RELASI KERJA SAMA PEMERINTAH DAN KOMUNITAS PUBLIK DALAM PENGELOLAAN MUSEUM KONFERENSI ASIA AFRIKA DI KOTA BANDUNG

Rhesa Anggara Utama

Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

E-mail: rhesa.anggara.insoendia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini yaitu mengenai relasi kerja sama pemerintah dan komunitas publik dalam pengelolaan museum. Penelitian ini berusaha untuk mengungkap relasi kerja sama antara pemerintah dan komunitas publik untuk mencapai suatu tujuan yang bermuara pada kualitas pengelolaan museum yaitu pada Museum Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penentuan informan dilakukan berdasarkan kriteria, dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kerja sama pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan komunitas publik melalui Sahabat Museum Asia Afrika telah terlaksana dengan kedudukan setara sebagai mitra aktif, adanya kerjasama telah berkontribusi positif dalam meningkatkan partisipasi kunjungan, minat masyarakat secara luas dari tahun ke tahun, serta menghadirkan respon positif dari berbagai pihak melalui relasi kerja sama yang dapat dijadikan sebagai model percontohan dalam konteks pengelolaan museum di berbagai daerah lainnya. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa peraktek relasi kerja sama pemerintah dan komunitas publik dalam pengelolaan museum konferensi asia afrika dinilai sudah terjadi namun belum berjalan secara optimal sangat terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas yang mendukung perjalanan kerjasama, sehingga direkomendasikan agar relasi kerjasama yang selama ini terjadi terus dikembangkan dan disempurnakan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Relasi Kerja sama, Pengelolaan, Museum Konferensi Asia Afrika*

ABSTRACT

This research is about the relationship between the government and the public community in managing the museum. This study seeks to uncover cooperative relationship between the government and the public community to achieve a goal that leads to the quality of museum management, the Museum of the Asian-African Conference in Bandung City. This study uses a qualitative method, determination of informants is done based on criteria, where data collection uses in-depth interviews, observation, and documentation techniques. The results showed that the government's cooperative relations through the Technical Implementation Unit

(UPT) of the Directorate of Public Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the public community through the Friends of the Asia-Africa Museum had been carried out with an equal position as an active partner. The collaboration contributed positively to increasing visit participation and interest in the community at large from year to year, as well as presenting positive responses from various parties through cooperative relationships that can be used as pilot models in the context of museum management in other areas. This study concludes that the practice of cooperative relations between the government and the public community in managing the Asia-Africa Conference Museum is considered not running optimally, which is closely related to the limitations of human resources, budget, and facilities that support the journey of cooperation. Therefore, it is recommended that the cooperative relations that have been going on continue to be developed and continuously improved.

Keywords: *Cooperation Relations, Management, Museum of the Asian-African Conference*

PENDAHULUAN

Derasnya arus globalisasi seiring dengan berkembangnya arus informasi dan teknologi di era 4.0 menuntut semua bangsa di seluruh negara dunia untuk memperkuat ketahanan dalam segala aspek kehidupannya, tidak terkecuali upayanya dalam memperkuat ketahanan budaya demi kelangsungan eksistensi kepribadian suatu bangsa.

Realitas tersebut tentunya menjadi tantangan, ancaman sekaligus menghadirkan peluang yang positif apabila disikapi dengan bijak oleh semua pihak. Melalui warisan budaya yang dimiliki oleh setiap bangsa tentunya dapat menjadi modal utama yang sangat berharga untuk mempertegas posisi dalam dinamika globalisasi berdasarkan kekuatan kepribadian bangsa.

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan warisan budaya, melalui proses perjalanannya sebagai suatu bangsa hingga sampai dengan saat

ini masih berdiri kokoh sejak di proklamasikannya sebagai negara merdeka sejak tahun 1945.

Proses dinamika globalisasi yang terus terjadi dari waktu ke waktu telah banyak mempengaruhi pergaulan hidup semua bangsa, negara di dunia tidak terkecuali Indonesia untuk semakin terbuka ditengah-tengah arus pergaulan internasional yang sangat kompetitif.

Kehadiran museum-museum secara nasional yang di bentuk di setiap daerah, merupakan salah satu upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah secara nasional, dengan harapan dapat menjadi solusi atas ketahanan budaya untuk menghadapi berbagai gempuran budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. semakin

Gagasan pokok untuk mendirikan museum merupakan proses pembentukan dan pendirian lembaga budaya atau tempat penyimpanan, pameran, dan penjagaan koleksi benda

atau artefak yang memiliki nilai sejarah, seni, budaya, ilmu pengetahuan, atau nilai penting lainnya. Tujuan utama pendirian museum adalah untuk melestarikan dan mengabadikan warisan budaya, sejarah, dan pengetahuan bagi generasi masa kini dan mendatang. (Munoz : 2020)

Pada tataran nasional dikenal arah dan tujuan yang jelas untuk apa museum didirikan, yaitu sebagai sarana edukatif-kultural, inspiratif, dan rekreatif dalam rangka menunjang usaha pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. (Asmara STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh, 2019)

Sebagaimana pandangan di atas tersebut mempertegas bahwa adanya urgensi kehadiran museum secara positif, namun di sisi lain sudah diketahui secara luas bahwa kehadiran museum-museum di Indonesia banyak dinilai oleh berbagai kalangan terutama pegiat konservasi museum yaitu dinilai belum optimal dikelola secara terstruktur, sistematis dan massif sebagai pilar utama bagi aktivitas kebudayaan, kesenian, sejarah, maupun ilmu pengetahuan untuk pembangunan karakter bangsa.

Hal tersebut mempertegas gagasan bahwa diperlukan upaya serius dengan melibatkan semua pihak terutama Pemerintah untuk mengubah citra dan wajah museum Indonesia agar menjadi lebih menarik dan lebih prima sehingga dapat memberikan manfaat positif yang lebih besar bagi

pengembangan aspek sosial budaya, politik, ekonomi, termasuk meningkatnya minat dan kunjungan publik.

Dengan demikian maka kehadiran museum secara singkatnya dapat mengambil inisiatif dan peran untuk revitalisasi berbagai aspek penting dalam kehidupan kebangsaan-kenegaraan di Indonesia.

Salah satu museum di Indonesia yang cukup populer dan mendunia yaitu Museum Konferensi Asia Afrika, museum yang terletak di Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Museum tersebut merupakan saksi sejarah yang telah membawa Negara Indonesia ke panggung dunia melalui kekuatan diplomasi politik melalui gerakan Non Blok yang di motori oleh Ir. Soekarno sebagai presiden pertama negara Republik Indonesia telah berhasil membuktikan kepada dunia internasional bahwa kekuatan diplomasi politik Indonesia patut diperhitungkan.

Kehadiran Museum Konferensi Asia Afrika tidak berarti tanpa adanya persoalan dalam konteks pengelolaannya, beragam persoalan pengelolaan museum tersebut juga terjadi sebagaimana persoalan pengelolaan museum di Indonesia pada umumnya.

Pada konteks pemerintahan bahwa pemerintah bukan lagi sebagai aktor satu-satunya dalam pembangunan, pendekatan baru tata kelola pemerintahan yaitu paradigma kolaboratif sebagai paradigma baru

kepemerintahan, menurut Purwanti (174:2016) bahwa semakin kompleks suatu fenomena empiris sebagai isu yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan keterbatasan pemerintah pada kapasitas internal yang dimiliki dalam merealisasikan berbagai kebijakan dan agenda program, terutama keterbatasan dalam ketersediaan sumber daya maupun jaringan mendorong pemerintah untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak secara akif, baik lintas institusi pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama yang kolaboratif dalam mencapai tujuan dalam agenda kebijakan atau program.

Adanya komunitas publik yang turut serta dalam pengelolaan museum Konferensi Asia Afrika melalui Sahabat Museum merupakan fenomena pemerintahan kolaboratif di tengah keterbatasan pemerintah dalam hal ini Unit Pengelola Teknis Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Selanjutnya sebagai gambaran lebih jelas pada bagian ini penulis uraikan mengenai hasil penelitian terdahulu mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para peneliti yang telah menghadirkan berbagai hasil penelitiannya. Peneliti terdahulu berfokus pada peran salah satu pihak dalam keterlibatannya dalam pengelolaan Museum, salah satunya pada Museum Konferensi Asia Afrika.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmelia (48-63 : 2019) menurutnya adanya urgensi format baru keterlibatan warga negara muda pada sebuah komunitas, yaitu Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika (SMKAA) menjadi semangat terbarukan berupa kebersamaan, semangat perjuangan, melepaskan subjektivitas, dan semangat bersatu. (*View of Transformasi Spirit Konferensi Asia Afrika Pada Keterlibatan Warga Negara Muda Sebagai Pembinaan Identitas Kebangsaan*, n.d.)

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Fazriyah (2018) dalam disertasinya yang berjudul *Perkembangan Museum Konferensi Asia Afrika Tahun 1980-2013*, penelitian tersebut menitikberatkan pada sejarah perkembangan museum dilihat dari prespektif sejarah museum.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muliadi (2016). dengan artikel jurnal yang berjudul *pengelolaan museum arma sebagai daya tarik wisata budaya di desa ubud*, penelitian ini pun serupa dengan lainnya lebih menitikberatkan pada peran unit pengelola museum yang tidak berbasiskan pada kolaborasi dengan aktor komunitas publik

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa penelitian terdahulu belum ada yang melakukan penelitian tentang pengelolaan museum pada objek dan lokus penelitian yang sama melalui pendekatan relasi kerjasama sebagai bagian dari

kolaboratif, sebagai hubungan pemerintahan antara pemerintah dengan *stakeholder* lainnya di luar pemerintah. Sedangkan penelitian yang relevan tentang objek dan lokus pengelolaan museum konferensi asia afrika sudah ada, namun penekanannya terhadap aspek peran satu pihak dan lebih kepada arena manajemen semata. Hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti agar penelitian ini perlu dilakukan.

Selanjutnya diuraikan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis format relasi kerjasama antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Diplomas Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika sebagai mitra aktif dalam pengelolaan Museum

Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam kerjasama tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka tegasnya bahwa penelitian ini memberikan sumbangan yang spesifik mengenai pengetahuan baru (*novelty*) tentang pengelolaan museum ditinjau dari pendekatan studi relasi kerjasama sebagai kontribusi keilmuan di bidang Ilmu Pemerintahan (Kontribusi Pengetahuan, Mengembangkan Teori, Mengembangkan Dimensi, Mengembangkan Model Baru, Kebaruan Konsep), dengan judul “Relasi Kerjasama Pemerintah dan Komunitas Publik Dalam Pengelolaan Museum Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung”.

KAJIAN PUSTAKA

Sebagai gambaran kajian pustaka yang digunakan untuk menganalisis penelitian pada studi “Relasi Kerja sama Pemerintah dan Komunitas Publik Dalam Pengelolaan Museum Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung” secara singkat akan diuraikan sebagai berikut.

Sebagai penguatan argumentasi pentingnya kerja sama melalui pendekatan tata kelola pemerintahan kolaboratif sebagai paradigma baru pemerintahan, merujuk pada pendapat Purwanti (174:2016) yang menyatakan

bahwa semakin kompleks suatu fenomena empiris sebagai isu yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan keterbatasan pemerintah pada kapasitas internal yang dimiliki dalam merealisasikan berbagai kebijakan dan agenda program, terutama keterbatasan dalam ketersediaan sumber daya maupun jaringan mendorong pemerintah untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak secara aktif, baik lintas institusi pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin

kerjasama yang kolaboratif dalam mencapai tujuan dalam agenda kebijakan atau program.

Selanjutnya istilah kerja sama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan atau proses bekerja bersama-sama dengan orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama atau untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan (2019).

Pemahaman lainnya mengenai kerjasama menurut Bouwman dalam bukunya *Collaborative Value Co-creation in the Platform Economy*, menyatakan bahwa kerjasama dimaksudkan untuk mencapai hasil atau tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara efektif atau efisien jika dilakukan secara individual. Melalui kerjasama, individu atau kelompok bekerja sama, berbagi sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan untuk mencapai hasil yang lebih baik atau untuk menyelesaikan

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif (*qualitative-descriptive*) dengan unit analisis terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam relasi kerjasama pemerintah dan komunitas publik dalam pengelolaan museum konferensi asia afrika di Kota Bandung.

Penentuan informan dilakukan berdasarkan kriteria, dimana pengumpulan data menggunakan teknik

tugas atau proyek yang lebih kompleks. (Bouwman : 2019).

Ada beberapa muatan kerjasama sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, merujuk pada pendapat Wijaya dalam bukunya yang berjudul *Pemerintahan Desa atau Marga*, muatan materi kerjasama sebagai berikut:

1. Bentuk kerja sama
2. Objek kerja sama
3. Muatan materi keputusan kerja sama
4. Biaya pelaksanaan kerja sama
5. Penyelesaian Perselisihan yang terjadi dalam kerja sama (Wijaya, 2002: 62)

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa adanya urgensi dari relasi kerjasama sebagai pendekatan pemerintahan kolaboratif yang dimana bahwa pemerintah perlu untuk membangun kerjasama dengan aktor lainnya dalam mengantisipasi kekurangan pada dirinya..

wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif, Patton (2015) yaitu tipe penelitian bertujuan untuk memahami dan mendalami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif, kontekstual, dan interpretatif. Pendekatan kualitatif memfokuskan pada pemahaman makna, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok

dalam konteks yang kompleks dan alami.

Merujuk kepada pemahaman tersebut peneliti memilih desain kualitatif untuk memahami dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan, mencakup proses mengeksplorasi fakta dan data objek di lapangan sebagaimana adanya terkait bagaimana relasi kerja sama pemerintah dan komunitas publik dalam pengelolaan museum konferensi Asia Afrika di Kota Bandung.

Creswell (2013) menegaskan bahwa penelitian kualitatif penting dilakukan untuk mengungkap pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia dari perspektif yang kompleks dan kontekstual, secara esensi dalam pendapatnya yakni berusaha mengungkap secara mendalam fenomena yang akan diteliti. Dalam hubungan itu Sutopo (2016) menekankan bahwa, penelitian kualitatif sebagai sebuah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan cara yang mendalam dan detail. Penelitian kualitatif berfokus pada interpretasi dan pemahaman terhadap makna subjektif yang diberikan oleh individu atau kelompok yang menjadi objek penelitian.. Kemampuan dalam analisis penelitian tersebut hendaknya diselaraskan dengan metode penelitian yang digunakan. Penerapan metode penelitian akan mempermudah dalam alur penelitian yang terstruktur. Metode

penelitian tersebut dijabarkan secara dekriptif dan ditulis tidak melebihi 300 kata, serta disematkan pula sumber referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini disajikan hasil penelitian lapangan tentang relasi kerjasama antara pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis Pengelola Museum Konferensi Asia Afrika di bawah Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri dan komunitas publik melalui Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika sebagai mitra aktif dalam pengelolaan Museum Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung dan bagaimana pola hubungan yang dibangun antara lembaga pemerintah tersebut dengan komunitas yang didirikan oleh masyarakat peduli museum tersebut.

1. Konstruksi Kerja sama Pengelolaan Museum Konferensi Asia Afrika

Berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa sistem pengelolaan Museum Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung telah dilakukan secara terencana, terarah oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Museum dengan melibatkan komunitas masyarakat dalam hal ini yakni Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika sebagai mitra aktif secara umum maupun secara khususnya merupakan model baru dalam sistem pengelolaan museum konteks Indonesia yang bertujuan untuk

menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Konferensi Asia Afrika berdasarkan tugas fungsi yang telah ditetapkan dalam hal pelestarian, pengembangan, dan promosi nilai-nilai Konferensi Asia Afrika sangat berperan besar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Konferensi Asia Afrika berada dibawah komando seorang Kepala Museum, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Publikasi dan Promosi Nilai-nilai Konferensi Asia Afrika, Seksi Pelestarian dan Dokumentasi Diplomasi Publik, Kelompok Jabatan Fungsional.

Sementara keberadaan Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika sebagai komunitas berada di bawah kepemimpinan seorang Koordinator Eksekutif, Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika memiliki susunan kepengurusan yang jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan tetap berpegang kepada prinsip komunikasi, koordinasi, kerjasama, integrasi dan sinkronisasi. Adapun untuk lebih jelasnya bagaimana praktek relasi kerjasama dilakukan antara kedua belah pihak tersebut maka diuraikan sebagai berikut.

1.1 Hubungan dalam aspek bentuk kerjasama

Aspek bentuk kerjasama yang dibangun antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Diplomasi Publik dan Sahabat Museum Konferensi Asia

Afrika dalam pengelolaan Museum Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung secara mendasar adalah *Joint Services dan Equipment Sharing*. Terkaiat dengan *Joint Services* dalam hal ini adalah kerjasama dalam memberikan pelayanan publik, kedua belah pihak secara bersama-sama memberikan pelayanan kepada pengunjung Museum Konferensi Asia Afrika sesuai dengan Visi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Diplomasi Publik dan Komunitas Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika yaitu mewujudkan museum Konferensi Asia Afrika yang bersahabat dan bermanfaat.

Praktik bentuk kerja sama antara kedua belah pihak tersebut dalam pemberian layanan atau *Joint Services* kepada pengunjung Museum Konferensi Asia Afrika, berdasarkan hasil penelitian setelah dilakukan analisis cukup memberikan dampak positif, dengan dilakukannya kerjasama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, Kerjasama pelayanan atau *Joint Services* yang dimaksud yaitu pemanduan dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta mengambil pelajaran dari sejarah politik internasional, wawasan kebangsaan melalui diplomasi publik (*public diplomacy*) maupun diplomasi antar warga (*citizen diplomacy*) melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, bedah buku, pemutaran film, festival, pameran, kursus berbagai

bahasa, penyediaan fasilitas pameran tetap, perpustakaan, internet, ruang audiovisual yang dapat di gunakan oleh semua pengunjung museum pada waktu tertentu, perayaan peringatan Konferensi Asia Afrika seperti yang senantiasa dilaksanakan setiap bulan April dalam rangka memperingati hari Konferensi Asia Afrika.

Sedangkan kerja sama dalam penggunaan fasilitas atau *Equipment Sharing* secara bersama-sama dalam menjalankan berbagai aktivitas di dalam museum maupun diluar museum dengan menggunakan asset milik negara yang di kelola oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Museum di bawah Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, menurut hasil analisis penulis tercermin dengan digunakannya berbagai sarana prasarana oleh Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika seperti ruang diskusi, pemutaran film, perpustakaan, termasuk sekretariat yang digunakan oleh Komunitas Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika, serta fasilitas lainnya.

Secara positif berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis analisis bahwa dengan adanya kerjasama baik melalui bentuk pelayanan dan penggunaan fasilitas telah mampu meningkatkan jumlah kunjungan dari tahun ke tahun, terutama sejak tahun 2011 setelah hadirnya Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika dengan pelayanan yang tersedia, diantaranya ada berbagai aktivitas kerjasama seperti

pemanduan terhadap pengunjung baik kunjungan resmi tamu pemerintah maupun kunjungan kelompok dan umum oleh para Kurator dari pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika bersifat sukarelawan.

1.2 Hubungan dalam aspek objek kerjasama

Pada praktik hubungan dalam aspek objek kerjasama antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diplomasi Publik dan Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika dilakukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan berdasarkan kejelasan objek yang dikerjasamakan.

Adapun objek kerjasama terkait dengan *pertama* pemeliharaan sarana dan prasarana diantaranya terhadap ruang pameran tetap, perpustakaan, ruang audiovisual, koleksi benda-benda tiga dimensi, untuk objek kerjasama lainnya *kedua* kegiatan yang bersifat edukatif, diantaranya pelaksanaan pameran museum, seminar, penayangan film, diskusi, kursus Bahasa, peringatan Konferensi Asia Afrika dan seterusnya, adapun objek kerjasama yang ketiga sangat terkait dengan kegiatan promosi museum konferensi asia afrika.

Pembagian tugas dalam objek kerjasama antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Diplomasi Publik dan Komunitas Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika, tidak bersifat struktural artinya pembagian kerjasama bukan berdasarkan hubungan antara bawahan dan atasan melainkan berdasarkan atas kesepakatan kedua

belah pihak dalam menentukan objek apa saja yang akan di kerjasamakan dalam pengelolaan museum Konferensi Asia Afrika, sedangkan pembagian tugas secara internal masing-masing pihak dilakukan secara mandiri sesuai dengan aturan yang berlaku pada masing-masing pihak.

Dengan demikian maka dapatlah di pahami bahwa hubungan dalam aspek objek kerjasama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Diplomasi Publik dan Komunitas Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika sebagai Mitra Aktif dalam pengelolaan Museum Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung, tetap harus memperhatikan aspek-aspek manajemen tersebut seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan evaluasi sehingga kerjasama yang di bangun dapat tercapai secara efektif dan efisien.

1.3 Hubungan dalam aspek muatan materi keputusan kerja sama

Adanya hubungan kerjasama dalam berbagai aspek, pada bagian ini diuraikan aspek muatan materi keputusan kerjasama berdasarkan hasil penelitian lapangan, sangat terkait dengan objek kerjasama baik terkait pemeliharaan sarana prasarana, edukatif maupun promosi museum Konferensi Asia Afrika sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menghadirkan sdm termasuk kurator yang memiliki kompetensi mengedukasi, kemudian kegiatan

seminar, dialog, diskusi, kajian ilmiah, penayangan film, kursus bahasa serta aktifitas edukatif lainnya dalam pandangan peneliti hal tersebut sangat penting.

Muatan materi keputusan tersebut berdasarakan hasil Analisa peneliti sudah memiliki substansi yang tepat, sehingga museum yang senantiasa dipersepsikan hanya sebagai tempat menyimpan barang-barang kuno, menyimpan koleksi barang-barang antik, bahkan tidak jarang yang mengasosiasikan museum dengan hal-hal mistik dapat diantisipasi.

1.4 Hubungan dalam aspek biaya pelaksanaan kerja sama

Dalam aspek biaya pelaksanaan kerjasama berdasarkan hasil penelitian, yaitu selama ini menunjukkan bahwa terdapat alokasi dana untuk aktivitas kerjasama yang alokasikan secara khusus oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Diplomasi Publik dalam jumlah tertentu yang bersumber dari APBN, juga diperoleh dari sumbangan tidak mengikat, imbalan jasa inisiatif para wisatawan lokal maupun mancanegara yang secara khusus meminta kepada Sahabat Musuem Konferensi Asia Afrika untuk memberikan pendampingan di luar museum, meskipun adanya berbagai alokasi dana pengelolaan museum tersebut dinilai oleh para pihak sangat terbatas untuk kelangsungan kerjasama dalam pengelolaan museum Konferensi Asia Afrika, hal tersebut dalam pandangan penulis kedepan agar dapat

melakukan berbagai kreatifitas untuk meningkatkan sumber keuangan kerjasama seperti membentuk badan koperasi bersama yang dapat dikleola secara serius sehingga kedepannya dalam menjalankan berbagai aktifitas atau kegiatan kerja sama semakin lebih baik.

1.5 Hubungan dalam aspek penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam kerja sama

Dalam aspek penyelesaian perselisihan apabila terjadi dalam kerjasama berdasarkan hasil penelitian lapangan yaitu dilakukan melalui musyawarah, bahwa musyawarah dinilai sebagai cara terbaik dalam penyelesaian berbagai perselisihan yang terjadi, karena musyawarah merupakan ciri kepribadian bangsa Indonesia yang harus dipertahankan dan dikembangkan yang tercermin dalam pandangan hidup yaitu Pancasila.

2. Faktor Pendukung & Hambatan Relasi Kerja sama Pengelolaan Museum Konferensi Asia Afrika

Berikutnya adalah peembahasan dan hasil penelitian mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam relasi kerjasama

2.1 Faktor Pendukung

Adapun dalam relasi kerja sama terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya, *pertama* adanya mekanisme perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola, mekanisme pengalokasian dana kegiatan, mekanisme pembagian tugas dan

penetapan berbagai program kerjasama berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, *kedua* adanya ketersediaan anggaran operasional kerjasama dalam pelestarian, pengembangan museum, *ketiga* adanya gagasan dan penerapan manajemen pelestarian, pengembangan, promosi nilai-nilai Konferensi Asia Afrika, pemeliharaan sarana prasarana, koleksi benda-benda Museum.

2.2 Faktor Hambatan

Namun di samping adanya faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat terhadap relasi kerja sama tersebut diantaranya *pertama*, keterbatasan anggaran, aspek biaya pelaksanaan kerja sama selama ini masih bergantung pada alokasi dana yang tersedia dari APBN yang disalurkan kepada Kementerian Luar Negeri, *kedua* belum adanya pedoman khusus yang bersifat normatif-hukum yang merinci mengenai teknis pola kerja sama, tata kerja pembagian kewenangan, tugas pokok dan fungsi dan dilaksanakan secara konsisten antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Konferensi Asia Afrika dan Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika dalam pengelolaan Museum, *ketiga* keterbatasan sarana prasarana layanan untuk pengunjung sebagai pusat pelaksanaan kerjasama pelayanan terhadap pengunjung.

KESIMPULAN

Relasi kerja sama telah terjadi antara pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis Museum Konferensi

Asia Afrika Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan komunitas publik Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika dalam pengelolaan museum Konferensi Asia Afrika sebagai sebagai pusat kebudayaan, penelitian, ilmu pengetahuan yang sangat bersejarah. Hasil kerja sama atau *outcome* menunjukkan keberhasilannya dalam meningkatkan berbagai kegiatan museum yang berdampak positif terhadap peningkatan jumlah kunjungan dari berbagai kalangan dari waktu ke waktu, hal tersebut tidak terlepas dari segala upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak melalui komitmen bersama dalam pendayagunaan seluruh sumber daya. Adanya faktor pendukung dan hambatan merupakan tantangan

sekaligus peluang untuk memperkuat relasi kerja sama satu sama lain yang selama ini sudah terbangun, sebagai rekomendasi sebaiknya kerjasama antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Diplomasi publik dan Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika semakin di tingkatkan dalam segala aspeknya sehingga Museum Konferensi Asia Afrika semakin hidup dengan berbagai aktifitas, kemudian segera membentuk Badan Usaha Koperasi Museum agar dapat mengantisipasi keterbatasan anggaran, segera melakukan perluasan dan pengembangan fasilitas museum agar lebih dapat mendukung dalam aspek pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

Acuan dari buku:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Berardo, R., Fischer, M., & Hamilton, M. (2020). *Collaborative governance and the challenges of network-based research. The American Review of Public Administration, 50(8), 898-913.*

Bouwman, H., & van de Wijngaert, L. (Eds.). (2019). *Collaborative Value Co-creation in the Platform Economy*.

Springer.

Creswell, J. W. 2013. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Flick, U. 2018. *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Munoz, J. M. (Ed.).(2020). *The International Handbooks of Museum Studies: Museum*

Management. Wiley.

Sanjaya, E. 2020. *Filsafat Penelitian Sosial: Memahami Metode, Paradigma, dan Etika Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group

Sutopo, H. B. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Acuan artikel dalam Jurnal:

Asmara STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh, D. (2019). Peran Museum dalam Pembelajaran Sejarah. *Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora*, 2(1), 10–20.<https://doi.org/10.31539/KAGANGA.V2I1.707>

Asmara STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh, D. (2019). Peran Museum dalam Pembelajaran Sejarah. *Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora*, 2(1), 10–20.<https://doi.org/10.31539/KAGANGA.V2I1.707>

Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W.

C. (2021). *Implementing collaborative governance: models, experiences, and challenges*. *Public Management Review*, 23(11), 1581-1589.

Cerquetti, M. (2016). *More is better! Current issues and challenges for museum audience development: a literature review*. *Current Issues and Challenges for Museum Audience Development: A Literature Review (December 1, 2016)*. *JOURNAL OF CULTURAL MANAGEMENT & POLICY*, 6(1).

Hermawan, H., Sumartias, S., & Agustin, H. (2022). *Motivasi Dan Komunikasi Relawan Museum Konferensi Asia Afrika*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(21), 620-628.

Hafer, J., Ran, B., & Hossain, M. S. (2022). *Rethinking perspectives of power in collaborative governance*. *Journal of Public and Nonprofit Affairs*, 8(2), 260-280.

Muliadi, I. N., & Suryasih, I. A. (2016). *Pengelolaan Museum Arma Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Di Desa Ubud*. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4(2), 58.<https://doi.org/10.24843/jdepar.2016.v04.i02.p11>

Patton, M. Q. 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications

Rahmelia, S., & Ar, E. D. (2019). *Transformasi Spirit Konferensi*

Asia Afrika pada Keterlibatan Warga Negara Muda sebagai Pembinaan Identitas Kebangsaan. Journal of Moral and Civic Education, 3(2), 48-63.

Evidence dan Customer Experience Terhadap Kepuasan Pengunjung Museum (Konferensi Asia Afrika)." Service Management Triangle: Jurnal Manajemen Jasa 2.1 (2020).

Rohman, O. (2021). *Peran komunitas Guriang sahabat museum konferensi Asia Afrika bagi mahasiswa generasi milenial: Penelitian di museum konferensi Asia Afrika Kota Bandung (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)*

View of Transformasi Spirit Konferensi Asia Afrika pada Keterlibatan Warga Negara Muda sebagai Pembinaan Identitas Kebangsaan. (n.d). Retrieved March 19, 2022, from <http://jmce.ppj.unp.ac.id/index.php/JMCE/article/view/184/35>

Suryani, C. S., Andari, R., & Taufik, A. (2018). *Pengaruh Perceived Quality Terhadap Kepuasan Pengunjung di Museum Mandala Wangsit Siliwangi. THE Journal: Tourism and Hospitality Essentials Journal, 8(2), 75-88.*

Wang, H., & Ran, B. (2023). *Network governance and collaborative governance: A thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements. Public management review, 25(6), 1187-1211.*

Somantri, Putri Riva, and Purwadhi Purwadhi. *"Pengaruh Physical*